

LETUSAN GUNUNG SINABUNG DAN PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA

Hartini Retnaningsih*)



Abstrak

Letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara kembali mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menangani bencana. Penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan standar yang ada. DPR-RI perlu melakukan pengawasan atas implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan turunannya. DPR-RI perlu mengawal, agar penanganan bencana dilakukan sebaik-baiknya.

A. Pendahuluan

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus pada Ahad (15 September 2013) pukul 02.00 dan diikuti letusan-letusan berikutnya. Letusan terakhir terjadi Rabu, 18 September 2013 pukul 01.03, di mana abu vulkanik menyembur hingga 1.500 meter diikuti lontaran material pijar.

Gunung Sinabung berketinggian 2.460 meter dari permukaan laut dan mempunyai 4 kawah (Kawah I, II, III, dan IV). Gunung bertipe strato tersebut mempunyai catatan letusan seperti diperlihatkan pada Tabel.

Letusan Gunung Sinabung kali ini menyebabkan 15.281 jiwa menjadi pengungsi, lebih banyak dari pengungsi pada letusan tahun 2010 yang hanya 12.000 jiwa. Jumlah pengungsi sempat melonjak hingga 15.691 jiwa yang tersebar di 24 titik pengungsian, yang akhirnya difokuskan di 16 titik.

Tabel Sejarah Letusan
Gunung Sinabung

Tahun	Letusan
Sebelum 1600	Berupa muntahan batuan piroklastik serta aliran lahar yang mengalir ke arah selatan.
1912	Aktivitas Solfatara terlihat di puncak dan lereng atas.
2010	22 Agustus–7 September terjadi beberapa kali letusan yang di antaranya merupakan freatik. Satus Gunung Sinabung berubah dari tipe B menjadi tipe A.
2013	Terjadi letusan pada Minggu dini hari, 15 September 2013. Letusan masih terjadi lagi hingga beberapa kali kemudian. Saat ini status gunung pada level III atau siaga. Jumlah pengungsi di Posko Bencana Kabupaten Karo mencapai lebih dari 11.000 jiwa.

Sumber: *Kompas*, 19 September 2013.

*) Peneliti bidang Studi Kemasyarakatan (Kepakaran Analisis Dampak Sosial dan Evaluasi Program) pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: hartiniretnaning@yahoo.com

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

Upaya mobilisasi pengungsi harus dilakukan, mengingat bahaya langsung akibat letusan gunung api berupa leleran lava, aliran piroklastik (awan panas), dan jatuhnya piroklastik. Selain itu, letusan gunung api juga mengandung bahaya sekunder berupa lahar hujan, banjir bandang, dan longsoran vulkanik, yang membahayakan penduduk serta dapat mengubah topografi sungai dan merusak infrastruktur.

B. Penanganan Pengungsi

Ada sejumlah permasalahan dalam penanganan pengungsi, di antaranya banyak warga di zona aman yang ikut mengungsi, sehingga menambah beban para petugas. Selain itu, juga terjadi ketegangan di mana para korban menyalahkan PVMBG yang tidak memberi tahu warga akan terjadinya letusan pada Ahad (*Media Indonesia*, 15 September 2013).

Di sisi lain, dalam kepanikan, ada masyarakat yang tidak mau mengungsi, padahal mereka tinggal di zona bahaya (radius 3 km), di antaranya warga Desa Berastepu, Kecamatan Simpang Empat. Mereka bertahan dengan alasan ingin menjaga rumah, ternak, dan tanaman kebun yang siap panen. Padahal mereka termasuk yang direkomendasikan untuk mengungsi. Warga Berastepu tercatat sebanyak 930 orang dan 20 persennya berada di zona bahaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Karo, dan Badan Geologi, terpaksa mengumumkan agar warga di zona aman yang sempat mengungsi untuk pulang. Lokasi yang dikosongkan hanya radius 3 km dari Gunung Sinabung. Tercatat sekitar 2.452 pengungsi dari sembilan lokasi pengungsian yang dilaporkan akan pulang. Proses pemulangan dibantu 15 truk dari TNI, BPBD, Brimob, Polres, Satpol PP, dan Dinas PU.

Upaya penanganan pengungsi seharusnya memang tidak terlepas dari sistem nasional penanggulangan bencana yang berlaku di Indonesia. Sistem tersebut mencakup: 1) Legislasi. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan

Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah; 2) Kelembagaan. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan *focal point* lembaga pemerintah di tingkat pusat. *Focal point* penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan dari sisi nonformal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia; 3) Pendanaan. Pendanaan penanggulangan bencana terdiri dari: a) Dana DIPA (APBN/APBD); b) Dana Kontijensi; c) Dana *On-call*; d) Dana Bantual Sosial Berpola Hibah; e) Dana yang bersumber dari masyarakat; dan f) Dana dukungan komunitas internasional.

Sistem nasional penanggulangan bencana tersebut harus dijabarkan di lapangan. Salah satu upaya Pemerintah adalah membentuk pos-pos pengungsian dan mengidentifikasi para pengungsi. Menko Kesra, Agung Laksono, telah meninjau lokasi dan menyerahkan bantuan senilai Rp300 juta. Selain itu, Kemensos juga mengerahkan 95 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan 10.000 paket bantuan senilai Rp637 miliar.

Untuk mengatasi dampak abu vulkanik, BNPB menjadwalkan hujan buatan pada 23–25 September 2013, untuk melarutkan abu vulkanik guna mengurangi risiko-risiko penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan mencegah kerusakan tanaman.

Penanganan bencana seharusnya difokuskan untuk menolong para korban, namun dalam kenyataan masih ada penyimpangan. Menurut *Kompas* (20 September 2013), para pengungsi lebih mengandalkan bantuan warga lain dibanding bantuan pemerintah. Bahkan Pos Pengungsi di Kecamatan Payung terpaksa menolak bantuan ikan teri dari pemerintah karena jumlahnya tidak sesuai, penerima harus menandatangani sebanyak 24 kg, padahal yang diserahkan hanya 15 kg. Selain itu, pengungsi juga enggan makan beras bantuan pemerintah sebab berasnya tidak layak.

BNPB Sumatera Utara dan TNI sangat menyalahkan sikap Pemerintah Kabupaten Karo yang lamban. Banyak bantuan terkendala tanda tangan Bupati. Bantuan yang terhambat

distribusinya antara lain berasal dari PNPB, Basarnas, Bulog, dan beberapa kementerian. Selain itu, hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Karo belum memiliki sistem peringatan dini (*early warning system*). Semua itu mengakibatkan kelambanan dalam upaya evakuasi dan penanganan pengungsi.

C. Dampak Sosial Bencana

Letusan Gunung Sinabung selain meninggalkan trauma dan kepanikan, juga meninggalkan beberapa permasalahan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Ratusan warga dirawat telah di RSUD Kabanjahe, karena menderita penyakit ISPA akibat letusan. Sejak terjadinya letusan hingga Kamis (20 September 2013) jumlah warga yang dirawat sebanyak 148 orang.

Akibat letusan Gunung Sinabung, sebanyak 22 sekolah diliburkan, terdiri dari 15 Sekolah Dasar dengan siswa sebanyak 2.374 orang, 6 Sekolah Menengah Pertama dan 1 Sekolah Menengah Atas dengan siswa sebanyak 2.312 orang. Sekolah yang paling banyak diliburkan berada di Kecamatan Naman Teran antara lain SD Negeri 040478 dan SDN 043950 di Desa Sigarang-garang, 2 SD di Desa Guru Kinayan dan masing-masing 1 SD di Desa Sukanalu dan Desa Simacem. Sementara 6 SMP yang diliburkan antara lain SMP Negeri 1 Simpang Empat, SMPN 1 Naman Teran dan SMP Satu Atap di Kecamatan Payung. Sedangkan SMA yang diliburkan yakni SMA Negeri 1 Simpang Empat.

Letusan Gunung Sinabung juga merusak tanaman pertanian dan perkebunan. Dari seluas 3.863 HA tanaman di enam kawasan, seluas 3.589 HA telah rusak akibat letusan. Hal ini kemudian berdampak pada kelangkaan bahan makanan. Pasokan sayur dan buah menurun hingga 40 persen karena banyak petani tak berani memanen, karena takut bahaya letusan. Terjadi kenaikan harga yang signifikan, misalnya sawi yang biasanya seharga Rp17.000/kg naik menjadi Rp20.000/kg.

D. Antisipasi Lebih Lanjut

Penanggulangan bencana gunung api berdasarkan sistem yang telah ada mencakup tahapan dari sebelum hingga setelah letusan. Sebelum letusan, hal-hal yang dapat dilakukan

adalah: a) Melakukan pemantauan dan pengamatan aktivitas semua gunungapi aktif; b) Membuat dan menyediakan Peta Kawasan Rawan Bencana dan Peta Zona Risiko Bahaya Gunung api, yang didukung dengan dengan Peta Geologi Gunung api; c) Melaksanakan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api; d) Melakukan bimbingan dan pemberian informasi kegunungapian; e) Melakukan penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung api; serta f) Melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya (sarana dan prasarana).

Saat letusan, yang harus dilakukan adalah menjauhkan masyarakat dari lokasi bencana. Dan setelah terjadi letusan, hal-hal yang dapat dilakukan adalah: a) Menginventarisir data, mencakup sebaran dan volume hasil letusan; b) Mengidentifikasi daerah yang terancam bahaya lanjutan; c) Memberikan saran penanggulangan bahaya; d) Memberikan penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang; e) Memperbaiki fasilitas pemantauan yang rusak; f) Menurunkan status kegiatan, bila keadaan sudah menurun; serta g) Melanjutkan pemantauan rutin.

Diperlukan kesadaran masyarakat untuk terus belajar dan memahami kondisi Gunung Sibanung, agar dapat dilakukan minimalisasi kerusakan dan korban jika kembali terjadi letusan. Hingga kini masyarakat terus berusaha memahami kondisi Gunung Sinabung, mengingat sudah 100 tahun terakhir gunung tersebut tidak meletus. Ada beberapa hal yang telah dilakukan, misalnya dalam kondisi gunung berstatus siaga, masyarakat tidak lagi tidur di dalam kamar, namun di ruang depan sehingga jika bencana terjadi mereka akan cepat bergerak. Masyarakat juga menyiapkan kopor/tas berisi pakaian jika harus mengungsi sewaktu-waktu. Masyarakat juga merasa perlu memiliki kendaraan untuk meninggalkan lokasi bencana dengan cepat.

Pemerintah pun perlu terus belajar dari setiap bencana, agar kualitas penanganan bencana menjadi lebih baik. Indonesia perlu menjaga citra dan mempertahankan status sebagai negara terbaik dalam penanganan bencana di wilayah Asia Pasifik. Sebagaimana diketahui, pada Agustus 2011, Indonesia

dinobatkan sebagai negara terbaik dan rujukan untuk belajar dalam hal penanggulangan bencana di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, 11 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Jepang, Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan sebagainya memutuskan untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana dan mengadopsi undang-undang kebencanaan di Indonesia.

Terkait penanganan bencana, pada Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan penghargaan *Global Champion for Disaster Risk Reduction Award* dari PBB. Bahkan, PBB menilai *web* BNPB terbaik se-Asia. Kerenanya, negara-negara ASEAN, Jerman, Spanyol, dan negara-negara Pasifik ingin belajar dari Indonesia untuk mengembangkan *web* yang sama.

Prestasi yang telah diraih dalam penanganan bencana tersebut perlu dipertahankan dan dipupuk terus-menerus, agar penanganan bencana di masa depan semakin baik.

E. Penutup

Letusan Gunung Sinabung kembali menyadarkan masyarakat akan pentingnya keseriusan mengatasi bencana. Selain diperlukan kesiapan Pemerintah dan masyarakat, diperlukan juga penanganan bencana yang komprehensif. Setiap bencana dapat dijadikan pelajaran untuk melakukan antisipasi lebih lanjut atas kemungkinan bencana-bencana lain pada masa mendatang.

DPR-RI perlu terus mengawal implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan turunannya. DPR-RI juga perlu terus melakukan pengawasan penanganan bencana, agar dalam setiap bencana dapat diminimalisir jumlah kerusakan dan korban, selain juga penanganan bencana dilakukan berdasarkan standar yang ada. Harus terus diupayakan agar situasi darurat bencana tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan pribadi atau golongan. Terakhir, DPR-RI juga perlu mendorong penganggaran yang memadai untuk penanganan bencana.

Rujukan:

1. "Gunung Sinabung: Sinabung Kembali Erupsi, Warga Desa Mengungsi," *Kompas*, 16 September 2013.
2. "Letusan Sinabung: Radius 3 Km Tetap Dikosongkan," *Kompas*, 17 September 2013.
3. "Gunung Sinabung: Gunung Meletus Kembali, Jumlah Pengungsi Berlipat Ganda," *Kompas*, 18 September 2013.
4. "Tak Ada Peringatan Dini di Sinabung: Pengungsi Mencapai 7.542 Jiwa," *Suara Pembaruan*, 18 September 2013.
5. "Gunung Sinabung Terus Bergolak," *Kompas*, 19 September 2013.
6. "Gunung Api: Belajar memahami Gunung Sinabung," *Kompas*, 19 September 2013.
7. "Sinabung Belum Aman," *Media Indonesia*, 19 September 2013.
8. "Pengungsi Sinabung Terus Bertambah," *Republika*, 19 September 2013.
9. "Solidaritas Terus Mengalir: Penanganan Pengungsi Korban Letusan Sinabung Butuh Perhatian," *Kompas*, 20 September 2013.
10. "Pengungsi Sinabung Terima Paket Lauk Pauk," *Media Indonesia*, 20 September 2013.
11. "Distribusi Bantuan Terlambat, Pengungsi Sinabung Terlantar," *Suara Pembaruan*, 20 September 2013.
12. "Pengungsi Sinabung Melonjak, Pemerintah Suruh Pulang," *Suara Pembaruan*, 20 September 2013.
13. "Lima Desa Wajib Dikosongkan: Warga Harus Berdamai dengan Sinabung," *Kompas*, Sabtu 21 September 2013.
14. "Pengungsi Sinabung Pulang: Warga Pulau Palue, NTT, Bosan di Pengungsian," *Kompas*, 23 September 2013.
15. "4.000-an Pengungsi Masih Bertahan," *Media Indonesia*, 23 September 2013.
16. "Masa Tanggap Darurat Diperpanjang," *Media Indonesia*, 24 September 2013.
17. "Sistem Penanggulangan Bencana," <http://www.bnppb.go.id/page/read/7/sistem-penanggulangan-bencana>, diakses 19 September 2013.
18. "Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Api," <http://www.ibnurusydy.com>, diakses 19 September 2013.
19. "Bahaya Gunung Api," <http://www.ibnurusydy.com>, diakses 19 September 2013.
20. Heru Susetyo, "Urgensi Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Indonesia," <http://www.esaunggul.ac.id/article>, diakses 19 September 2013.
21. "Gunung Sinabung Meletus, ACT Bantu Pengungsi," <http://www.arammah.com/news/2013/09/16>, diakses 23 September 2013.
22. "Gunung Sinabung Meletus, 22 Sekolah Diliburkan," <http://beritasumut.com/view/Peristiwa/12294>, diakses 23 September 2013.
23. "Soal Penanganan Bencana, Indonesia Terbaik di Asia Pasifik," <http://metro.kompasiana.com/2011/09/28>, diakses 23 September 2013.